

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR
DALAM PEMBERIAN OPINI AUDIT
ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi pada Auditor di BPK Perwakilan Provinsi Riau)**

**Oleh:
Ifany Arfa Unnisa
Pembimbing: Nurazlina dan Azhari**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email: ifanyarfa@gmail.com

*The Factors That Affect The Auditor on Giving Audit Opinion On Finances Report
(Studies of Auditor at Badan Pemeriksaan Keuangan Riau Province
Representation)*

ABSTRACT

This study was purpose to aimed the effect of interim investigation, indepedence, skills audit and scope audit on giving audit opinion on finances report. Collecting dataof this studyusing aquestionnairesubmitted to55auditors who work at Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau Province Representation. Fromquestionnaires distributed48questionnaires(87.27%) ware completed and canbeprocessed. Data analysis methode for this research wasmultiple regressionwith SPSS version 17. Result of this study give evidence that interim investigation, indepedence and skilss audit effect toward giving audit opinion on finances report. Meanwhile scope audit didnt effect toward giving audit opinion on finances report.The results showed that interim investigation have an effect on the giving audit opinion with coefficient of regression equal to 0.022by significance value equal to 0.000 (alpha 0.05). Indepedence have an effect on the giving audit opinion with coefficient of regression equal to 0,042 by significance value equal to 0.000 (alpha 0.05). Audit skills have an affect the on the giving audit opinion with coefficient of regression equal to 0.011 by significance value equal to 0.000(alpha 0.05). Audit scope do not affect on the giving audit opinionwithcoefficient of regression equal to 0.369 by significance value equal to 0.000 (alpha 0.05). R^2 square value equal to 0.547 or 54,7% which means that the independent variable in this study could affect the dependent variable, while the rest45,3% is explained by other variables not included in this study.

Keywords:audit opinion, interim investigation, indepedence, skills audit, andscope audit

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki wewenang

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK wajib menguji dan menilai sistem pengendalian internal (SPI) entitas yang bersangkutan,

seperti yang di amanatkan dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 berbunyi “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. BPK-RI diamanatkan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas LKPD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber dayanya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan akan menjadi acuan bagi pemakainya merupakan hasil dari proses terakhir audit seorang auditor dalam menyatakan atau menyampaikan pendapatnya didalam laporan audit.

Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan (IAI, SA Seksi

150). Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan.

Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat empat macam opini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), (3) Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). .

Sekarang banyak terdapat salah persepsi yang terjadi dikalangan masyarakat terhadap opini yang diberikan oleh BPK seperti opini wajar tanpa pengecualian. Masyarakat berpendapat bahwa opini wajar tanpa pengecualian sama dengan entitas tersebut bebas akan korupsi. Akibat selanjutnya apabila terjadi korupsi maka masyarakat meragukan opini yang dikeluarkan oleh BPK tersebut sehingga banyak kalangan yang meragukan kinerja BPK yang dapat memperjual belikan opini yang dikeluarkan oleh BPK.

Anggapan masyarakat tersebut diperkuat dengan terdapatnya kasus suap terhadap auditor BPK oleh Pemkot Bekasi pada tahun 2010. Dalam kasus ini ditemukan bukti uang sebesar Rp 372.000.000 yang akan digunakan oleh pemerintah kota Bekasi untuk menyuap auditor BPK Jawa Barat agar hasil laporan keuangan di daerah tersebut wajar tanpa

pengecualian. (<http://www.detiknews.com/read/2010/08/04/142018/10/kpk-gelar-rekonstruksi-kasus-suap-bpk-jabar-dan-pemkot-bekasi?>)

Dengan adanya kasus di atas menggambarkan bahwa seorang auditor dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan dipengaruhi oleh adanya suap yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah. Disamping itu, auditor didalam memberikan opini atas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pemeriksaan Interim, Independensi, Keahlian Audit dan Lingkup Audit.

Pemeriksaan interim merupakan audit pendahuluan yang dilakukan sebelum audit laporan keuangan dilakukan. Sasaran khusus pemeriksaan interim adalah pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan kepatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh kecukupan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Informasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan opini.

Selain pemeriksaan interim, hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian opini auditor adalah Independensi. Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002: 26).

Independensi auditor adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada pihak manajemen, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas audit, seorang auditor tidak hanya dituntut memiliki sikap independensi yang tinggi tetapi juga memiliki keahlian yang memadai. Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang independen untuk bekerja sebagai tenaga yang profesional. Bedard (1986) dalam Lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Lingkup audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi tim pemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukan berdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester, atau triwulan). (BPK RI, 2008: 21). Dalam SPKN (BPK RI, 2007: 56) lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan.

Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor

memberikan pengecualian di dalam pen-dapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Hasyim (2013) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Atas Laporan Keuangan” dengan adanya penambahan variabel yaitu Pemeriksaan Interim. Adapun alasan ditambahkannya variabel tersebut adalah masih sedikitnya peneliti yang memakai variabel Pemeriksaan Interim untuk mengukur pertimbangan auditor dalam menentukan opini untuk laporan keuangan .

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012). Penelitian Siregar ini meneliti pengaruh independensi, keahlian audit, lingkup audit dan audit judgment terhadap pemberian opini audit.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pemeriksaan interim berpengaruh terhadap pemberian opini audit? 2)

Apakah independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit? 3) Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit? 4) Apakah lingkup audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh pemeriksaan interim terhadap pemberian opini audit. 2) pengaruh independensi terhadap pemberian opini audit. 3) pengaruh keahlian audit terhadap pemberian opini audit. 4) pengaruh lingkup audit terhadap pemberian opini audit.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, agar membantu memahami dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis lebih dalam mengenai sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit.
2. Bagi pihak lain, dapat sebagai bahan referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis.

TINJAUAN PUSTAKA

Auditing

Pengertian auditing menurut PSAK - Tim Sukses UKT Akuntansi 2006 adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan dan menkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk

pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Berdasarkan PSAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Standar Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemeriksaan. SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada. SPKN dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) yang terdiri atas :

- 1) PSP Nomor 01 tentang Standar Umum.
- 2) PSP Nomor 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.
- 3) PSP Nomor 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.
- 4) PSP Nomor 04 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.
- 5) PSP Nomor 05 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja.
- 6) PSP Nomor 06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- 7) PSP Nomor 07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Ikatan Akuntan Indonesia (SA Seksi 150) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Pemeriksaan Interim

Pemeriksaan interim merupakan audit pendahuluan yang dilakukan sebelum audit atas laporan keuangan dilakukan. Pemeriksaan interim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan atas laporan keuangan dan merupakan praktik lazim. Pemeriksaan interim merupakan suatu strategi yang biasanya digunakan dalam beberapa hal selama tahun anggaran berjalan, misalnya konfirmasi, observasi persediaan, review sistem pengendalian intern, audit atas laporan triwulanan, dll. Pemeriksaan interim menyelesaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan audit terinci atau audit atas laporan keuangan.

Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.(Mulyadi, 2011:26-27).

Keahlian audit

Menurut Jaafar (2005), pengertian keahlian audit meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup: merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan, memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Lingkup Audit

Dalam SPKN (2007), lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan

pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pemeriksa Interim Terhadap Pemberian Opini Audit

Sasaran khusus pemeriksaan interim adalah pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan kepatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh kecukupan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Informasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan opini. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan pengumpulan data serta informasi lain terkait dengan LKPD yang akan diperiksa dilakukan untuk mengembangkan prosedur pemeriksaan selanjutnya. Hal tersebut meliputi kemungkinan terjadinya temuan yang berulang atau keyakinan pemeriksa atas kewajaran transaksi atau akun pada LKPD yang diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya terjadi kelemahan. Pemeriksa perlu memperhatikan temuan yang berulang untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan risiko pemeriksaan dan pertimbangan pemberian opini.

Akbar (2012) menemukan bahwa pemeriksaan interim efektif mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan definisi dan uraian diatas disimpulkan bahwa pemeriksaan interim berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini karena pemeriksaan interim dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu pemeriksaan dan dapat dijadikan pertimbangan pemberian opini.

H₁: Pemeriksaan Interim berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit

Pengaruh Independensi Terhadap Pemberian Opini Audit

Dalam Standar Profesional akuntan Publik SA seksi 220, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk memperhankan kebebasan pendapatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim (2013) Tamtomo (2008) dan Zu'mah (2009), yang menemukan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dan definisi diatas disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif

terhadap pertimbangan pemberian opini karena seorang auditor yang tidak independen berarti tidak mempunyai kejujuran dalam dirinya dalam mempertimbangkan fakta, dapat memihak pada suatu kepentingan tertentu, informasi yang diberikan tidak objektif, dan tidak bebas dari pengaruh/bujukan/pengendalian dari pihak lain sehingga dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dapat berpihak pada salah satu pihak tersebut.

H₂: Independensi berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit

Pengaruh Keahlian Audit Terhadap Pemberian Opini Audit

Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang independen untuk bekerja sebagai tenaga yang profesional. Bedard (1986) dalam Lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), pengertian keahlian audit meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup: merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan Laporan Hasil

Pemeriksaan, memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Pada penelitian Hasyim (2013) menemukan bahwa keahlian audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dan definisi diatas disimpulkan bahwa keahlian audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini karena seorang auditor apabila ahli dalam bidang akuntansi dan bidang audit dan memiliki pengalaman yang banyak akan menghasilkan opini yang baik.

H₃: Keahlian audit berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit

Pengaruh Lingkup Audit Terhadap Pemberian Opini Audit

Lingkup audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi timpemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukanberdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester, atau triwulan).(BPK RI, 2008: 21). Dalam SPKN (BPK RI, 2007: 56) lingkup pemeriksaan adalah bataspemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan.

Pembatasanterhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan,seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yangcukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat..

Pada penelitian Hasyim (2013) Lingkup audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Pembatasan terhadap lingkup audit dapat mempengaruhi pemberian opini audit.

Berdasarkan uraian dan definisi diatas disimpulkan bahwa lingkup audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini.

H₄: Lingkup audit berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah auditor eksternal pemerintah yaitu auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.Jumlah auditor yang bertugas di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau sebanyak 55 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh (metode sensus)

Karena jumlah populasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau hanya 55 orang, peneliti menggunakan semua pupulasi ini sebagai sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penyebaran kuisioner.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda.Wijaya (2012:104) mengemukakan bahwa regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh pemeriksaan interim, independensi, keahlian audit, dan lingkup audit terhadap

pemberian opini audit digunakan analisis statistik dengan regresi berganda yang diformulasikan dalam persamaan regresi sebagai berikut $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$

Pengujian Data

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan apakah semua data tersebut telah mengukur segala sesuatunya dengan tepat, dalam arti memang yang diukur adalah data yang dibutuhkan untuk menjawab *research questions* (Efferin *et al*, 2008:118). Data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari *r*-tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah data yang ada telah terukur dengan tepat dan tidak mengandung kesalahan material dari data yang diukur, proses pengukuran, maupun ukuran yang dipergunakan itu sendiri (Efferin *et al*, 2008:118). Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* (α) dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai *cronbach's alpha* di atas 0,6 begitu pula sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya

mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Wijaya, 2012:132). Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Untuk mendeteksinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* untuk tiap-tiap variabel independen. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai *tolerance* $< 0,10$ berarti terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2001).

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2006), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*). Jika *Scatterplot* membentuk pola tertentu yang jelas maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. Sebaliknya jika *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

(Ghozali, 2011). Uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini dilakukan secara terpisah, yaitu uji koefisien determinasi (R^2) untuk H_1 dan H_2 , uji koefisien determinasi (R^2) untuk H_3 , dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk H_4 .

Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Jika $r = +1$, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.

Pengujian Hipotesis

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaan. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan Sudirman Nomor 721 Pekanbaru. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini yang

menjadi sasaran penyebaran kuesioner adalah auditor yang bekerja di BPK Perwakilan Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 1:
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Opini Audit	48	36.00	50.00	44.3125	4.19298
Pemeriksaan Interim	48	18.00	30.00	24.8958	3.53848
Independensi	48	21.00	36.00	27.9375	3.70397
Keahlian Audit	48	33.00	50.00	40.9792	3.49157
Lingkup Audit	48	9.00	19.00	14.0625	1.96140

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Analisis deskriptif membahas kesimpulan yang diperoleh atas kecenderungan responden dalam menjawab kuesioner yang diajukan (Riduan, 2008).

Berdasarkan tabel 1, rata-rata jawaban responden terhadap pemeriksaan interim, independensi, keahlian audit dan lingkup audit yaitu 24,8958, 27,9375, 40,9792 dan 14,0625. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan interim, independensi, keahlian audit dan lingkup audit penyebaran datanya baik karena rata-rata lebih besar dari standar deviasinya..

Hasil Pengujian Validitas Data

Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pertanyaan pada variabel opini audit, pemeriksaan interim, independensi, keahlian audit dan lingkup audit memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} sebesar 0,285. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing pertanyaan dalam variabel penelitian ini dinyatakan valid.

Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas data untuk setiap variabel, diperoleh hasil *Cronbach alpha* lebih besar dari alpha 0,6 yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas menggunakan SPSS 17.0, terlihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat terpenuhi.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa untuk setiap variabel independennya memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinieritas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa data tersebar dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Hasil uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi, diperoleh angka DW sebesar 1,674, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi, karena angka DW berada diantara -2 sampai +2.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien deter-minasi adalah sebesar 0,547. Angka ini menjelaskan bahwa 54,7% pemberian opini audit dipengaruhi oleh pemeriksaan interim, independensi, keahlian audit dan lingkup audit. Sedangkan sisanya 45,3% pemberian opini audit dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda untuk H_1 dan H_2 sebagai berikut:

$$Y = 9,251 + 0,391 X_1 + 0,280$$

$$X_2 + 0,396 X_3 + 0,090 X_4 + e$$

PEMBAHASAN

Tabel 2 :
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipo tesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Signifik an	Alph a (α)	Keteranga n
H ₁	2,371	1,760	0,022	0,05	Diterima
H ₂	2,100	1,760	0,042	0,05	Diterima
H ₃	2,657	1,760	0,011	0,05	Diterima
H ₄	0,307	1,760	0,760	0,05	Ditolak

Sumber : Hasil pengolahan data 2015

Pengaruh pemeriksaan interim terhadap pemberian opini audit

Berdasarkan tabel 2, maka hasil pengujian untuk H_1 bahwa t hitung (2,371) > t tabel (1,760) dengan nilai signifikan sebesar 0,022 dengan tingkat kesalahan (*alpha*) 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu pemeriksaan interim berpengaruh terhadap pemberian opini audit. pemeriksaan interim berpengaruh terhadap pemberian opini audit. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa dengan adanya pemeriksaan interim yang merupakan audit pendahuluan memecahkan keterbatasan waktu

yang dialami oleh auditor sehingga informasi terkait entitas yang diaudit lebih banyak sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik dalam proses pemberian opini audit. Sehingga hipotesis pertama (H_1) **diterima**.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Akbar (2012) dan penelitian yang dilakukan oleh (2009) yang mengemukakan bahwa pemeriksaan interim efektif mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan.

Pengaruh independensi terhadap pemberian opini audit

Berdasarkan tabel 2, maka hasil pengujian untuk H_2 diperoleh bahwa t hitung (2,100) > t tabel (1,760) dengan nilai signifikan sebesar 0,042 dengan tingkat kesalahan (α) 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit. Dalam penelitian ini, independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit karena seorang auditor yang tidak independen berarti tidak mempunyai kejujuran dalam dirinya dalam mempertimbangkan fakta, dapat memihak pada suatu kepentingan tertentu, informasi yang diberikan tidak objektif, dan tidak bebas dari pengaruh/bujukan/pengendalian dari pihak lain sehingga dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dapat berpihak pada salah satu pihak tersebut. Sehingga hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Hasyim (2013), Akbar (2012), Siregar (2012), Tamtomo (2008), Zu'mah (2009) dan Suhartini (2009)

yang menemukan bahwa independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit.

Pengaruh keahlian audit terhadap pemberian opini audit

Berdasarkan tabel 2, maka hasil pengujian untuk H_3 diperoleh nilai bahwa t hitung (2,657) > t tabel (1,760) dengan nilai signifikan sebesar 0,011 dengan tingkat kesalahan (α) 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu keahlian audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit

Dalam penelitian ini, keahlian audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini karena seorang auditor apabila ahli dalam bidang akuntansi dan bidang audit dan memiliki pengalaman yang banyak akan menghasilkan opini yang baik. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) **diterima**.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Hasyim (2013), Siregar (2012), Tamtomo (2008) dan Suhartini (2009) yang menemukan bahwa keahlian audit berpengaruh auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Pengaruh lingkup audit terhadap pemberian opini audit

Berdasarkan tabel 2, maka hasil pengujian untuk H_4 diperoleh bahwa t hitung (0,307) > t tabel (1,760) dengan nilai signifikan sebesar 0,760 dengan tingkat kesalahan (α) 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu lingkup audit tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit.

Dalam penelitian ini, mengemukakan bahwa faktor pembatasan lingkup audit tidak mendorong auditor memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Auditor di BPK RI Perwakilan Riau tidak mengalami adanya pembatasan lingkup audit yang terlalu menyulitkan mereka dalam melakukan pemeriksaan sehingga dalam pemberian opini audit para auditor tidak terlalu dipengaruhi oleh opini audit. Jadi, dalam pemberian opini, auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tidak mempertimbangkan faktor lingkup audit. Sehingga hipotesis keempat (H₄) **ditolak**.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) menjelaskan bahwa lingkup audit tidak berpengaruh dalam pemberian opini audit. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasyim (2013), Akbar (2012), Aditya (2009) dan Suhartini (2009) yang menemukan bahwa lingkup audit mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

- a. pemeriksa interim berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Semakin baik pemeriksaan interim akan meningkatkan pertimbangan pemberian opini audit pada BPK RI Perwakilan Riau.
- b. Independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Auditor yang mempunyai tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan opini yang baik.

- c. Keahlian audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Auditor yang memiliki keahlian yang tinggi akan menghasilkan opini yang baik.
- d. Lingkup audit tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Pembatasan terhadap lingkup audit tidak dapat mempengaruhi pemberian opini audit.

Keterbatasan

- a. Penelitian ini hanya menggunakan instrument kuesioner sehingga belum menggambarkan secara utuh kondisi yang terjadi pada objek penelitian.
- b. Keterbatasan jumlah auditor yang dapat ditemui untuk dijadikan responden pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- c. Penelitian ini hanya dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, sehingga kurang mampu menggeneralisasi praktik-praktik pengukuran pertimbangan pemberian opini audit di Indonesia.

Saran

- a. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti variabel-variabel lain yang memengaruhi pertimbangan pemberian opini audit atas laporan keuangan seperti audit judgment, kepatuhan terhadap PABU, kekonsistenan dalam penerapan PABU dan lain-lain.
- b. Penelitian ini hanya dilakukan di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat

- meneliti untuk cakupan yang lebih luas.
- c. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti menggunakan metode selain penyebaran kuesioner agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait internal validity atau response bias.
- .

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Chandra. 2009. Faktor - Faktor Yang Mendorong Akuntan Publik Memberikan Pendapat Selain Wajar Tanpa Pengecualian. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Akbar, Aiman. 2012. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Interim, Pembatasan Lingkup Audit, Dan Independensi Terhadap Pertimbangan Opini Auditor (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
- Efferin, Sujoko. Darmadji, Stevanus Hadi. Tan, Yuliawati. 2008. Metode *Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. 2001. *Apikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. (Edisi Kedua) Semarang: Badan Penerbit Undip
- Ghozali, Imam. 2005. *Apikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. (Edisi Ketiga) Semarang: Badan Penerbit Undip
- Ghozali, Imam. 2006. *Apikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Hasyim, Wahid. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Dalam Memberikan Opini Audit Atas Laporan Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). *Skripsi*. Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaafar, H.T Redwan dan Sumiyati, 2005, *Kode Etik dan Standar Audit*, Diklat Pembentukan Auditor Terampil, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Lastianti, Sri Hexana. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Jurnal Media Riset*

- Mulyadi. 2011. *Auditing Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Riduwan. 2008. *Dasar-Dasar Statiska*. Bandung: Alfa Beta
- Siregar, Silky Raditya. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Suhartini, dan D.Ariyanto. 2009. Pengaruh Pemeriksaan Interim, Lingkup Audit, Dan Independensi Terhadap
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2006. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Tamtomo, Didiek Susilo. 2008. Faktor-Faktor yang Menentukan Opini Audit. *RBITH*, 4(3): 448-452.
- Wijaya, Tony. 2012. *SPSS 20; untuk Olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zu'amah, Surroh. 2009. Independensi dan Kompetensi Auditor Pada Opini Audit (Studi BPK Jateng). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(2): 145-154.
- .